

**PENINGKATAN TATA KELOLA
PUSAT PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN (PPKwu)
DALAM RANGKA MENJADI PUSAT MANDIRI**

Oleh:

Eddy Triharyanto ¹⁾, Tutik Susilowati ²⁾

1) Staff Pengajar Jurusan Agronomi FP Universitas Sebelas Maret

2) Staff Pengajar Jurusan PAP FKIP Universitas Sebelas Maret

email : eddytriharyanto@yahoo.co.id

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas manajemen serta pengelolaan PPKwusehingga diharapkan dapat menjadi pusat studi yang mandiri dalam mencapai pemenuhan target kerja dan anggaran. Melalui perbaikan tata kelola pusat studi diharapkan dapat meningkatkan dan menyinambungkan pelayanan pusat studi kepada mahasiswa dan masyarakat, meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian yang dilakukan serta meningkatkan jaringan kerjasama sehingga dapat mencapai misi UNS yaitu UNS menuju world class university.

Secara khusus, tujuan dari kegiatan ini adalah: 1) merevisirenstra, roadmap, dan SOP; 2) menyusun manual dan sasaran mutu pusat studi. Kegiatan ini bertolak dari adanya permasalahan di PPKwu yaitu terdapatnya duplikasi peran PPKwu dengan pusat studi lain, belum adanya manual mutu dan sasaran mutu yang menjadi panduan pelaksanaan program kerja,kekurangaktifan *peer group* disebabkan banyaknya kegiatan peergroup di fakultas, dan keterbatasan tenaga adminitrasi.

Kegiatan peningkatan tata kelola di PPKwu dilakukan melalui penyelenggaraan tiga tahapan workshop yaitu workshop revisi renstra dan roadmap, workshop penyusunan manual dan sasaran mutu dan workshop revisi SOP. Peserta workshop adalah semua peergroup PPKwu. Semua kegiatan PPKwu telah terlaksana, adapun kegiatan-kegiatan tersebut antara lain : workshop revisi roadmap dan renstra PPKwu serta workshop penyusunan manual & sasaran mutu dan SOP PPKwu.

Kata kunci : PPKwu, tata kelola, pusat mandiri

PENDAHULUAN

Pusat pengembangan kewirausahaan (PPKwu) merupakan salah satu pusat dibawah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS yang bergerak dalam bidang pengembangan kewirausahaan dan bisnis bagi civitas akademika dan masyarakat.Pada awalnya tahun 1996 PPKwu merupakan lembaga non struktural yang menjalankan program pengembangan kewirausahaan yang

berada di dalam lembaga dengan nama Pusat Pengembangan Kewirausahaan sesuai dengan SK Rektor No. 237/PT.40.H/I/1996 tanggal 20 mei 1996. Kemudian untuk mengantisipasi besarnya tuntutan masyarakat, dikeluarkan SK Rektor no. 208/J27/PP/97 tanggal 7 Juli 1997 tentang perubahan dari Pusat Pengembangan Kewirausahaan menjadi Lembaga Pengembangan Kewirausahaan (LPKwu yang memiliki tiga pusat yaitu: (1) Pusat Pengembangan Bisnis (Pusbangnis);

(2) Pusat Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa (PPKM); dan (3) Pusat Pengembangan dan Pelayanan Hak Atas Kekayaan Intelektual (P3HAKI).

Pada awal tahun 2003, dalam rangka restrukturisasi kelembagaan di lingkungan UNS, maka diadakan reorganisasi berdasarkan SK Rektor No.1B/J27/PP/2003 tanggal 2 Januari 2003 tentang reorganisasi dan pengintegrasian pusat-pusat LPKwuUNS dan pemberhentian tim pengelolanya. Selanjutnya, berdasarkan SK Rektor No. 1D/J27/KP/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang pengalihan dan pengintegrasian PusbangnisLPKwu ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNS, maka Pusbangnis LPKwu UNS berintegrasi ke dalam LPM UNS dan berubah nama menjadi Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu).

Dalam rangka mengupayakan efisiensi kelembagaan UNS, maka berdasarkan SK Rektor No. 649A/J.27/KP/2004 tanggal 30 Oktober 2004 tentang pembentukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM UNS, maka LPM UNS berintegrasi ke dalam LPPM, dan PPKwu menjadi salah satu pusat studi dalam kelembagaan LPPM.

Meskipun beberapa kali terjadi perubahan ditingkat kelembagaan, namun PPKwu tetap konsisten dalam pengembangan kewirausahaan dan bisnis. Hal ini sesuai dengan salah satu budaya kerja UNS yaitu Entrepreneurship. Visi PPKwu adalah menjadi pusat riset dan layanan yang profesional, unggul dan terdepan di bidang

kewirausahaan dan pengembangan bisnis bagi warga kampus dan masyarakat. Adapun misinya yaitu: 1) mewujudkan institusi PPKwu yang handal dan terpercaya; 2) membudayakan dan mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam kehidupan warga kampus dan masyarakat; 3) menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru dari kalangan terdidik; 4) mewujudkan pelaku bisnis mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang profesional, mandiri dan inovatif yang berwawasan iptek; 5) mewujudkan pusat kepakaran dalam bidang kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

PPKwu didukung oleh *peer group* yaitu dosen dari berbagai fakultas di lingkungan UNS, para pakar profesional, praktisi bisnis, serta staff administrasi yang memadai. Dalam menjalankan programnya, PPKwu bekerjasama dengan fakultas-fakultas di lingkungan UNS, perguruan tinggi di luar UNS, instansi pemerintah seperti Kemenristek, Kementerian Koperasi & UKM, Bank Indonesia, BUMN, Pemerintah Daerah, LSM, perusahaan-perusahaan, UKM dan sebagainya serta didukung dengan fasilitas yang memadai.

Saat ini PPKwu berupaya menjadi pusat mandiri yaitu pusat yang memiliki kegiatan unggulan yang berdampak pada peningkatan indeks publikasi, penerimaan revenue generating income dan peningkatan peran dalam memecahkan masalah pembangunan dalam konteks lokal, nasional dan global. Dalam proses menuju pusat mandiri ada beberapa masalah yang dihadapi oleh PPKwu antara lain terdapatnya duplikasi

peran PPKwu dengan pusat studi lain, belum adanya manual mutu dan sasaran mutu yang menjadi panduan pelaksanaan program kerja (selama ini PPKwu masih mengacu manual mutu dari LPPM),kekurangaktifan *peer group* disebabkan banyaknya kegiatan *peergroup* di fakultas, dan keterbatasan tenaga adminitrasi.

Sebagai upaya mengurangi duplikasi peran dengan pusat studi lain maka perlu adanya penajaman pada bidang kajian yang menjadi program utama PPKwu hal ini berdampak pada perlunya merevisi renstra dan roapmap yang telah disusun. Agar program kerja PPKwu dapat berjalan dengan lebih baik maka perlu adanya dokumen manual mutu dan sasaran mutu yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian kualitas. Untuk lebih meningkatkan keaktifan dan peran serta *peergroup* maka perlu adanya mekanisme yang mengatur tentang rekrutmen *peer group* dan kode etik *peer group*. Selain itu perlu adanya revisi SOP yang selama ini telah dibuat agar lebih implementatif.

Dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusiadan mendorong profesionalitas layanan pusat studi PPKwu termasuk di dalamnya kualitas sistem pengelolaan yang pada akhirnya mendukung visi dan misi PPKwu.

PEMECAHAN MASALAH

1. Merevisi Renstra dan Road Map PPKwu yang telah disusun.
2. Menyusun manual mutu dan sasaran mutu PPKwu

3. Merevisi Standar Operational Procedure (SOP)

TINJAUAN PUSTAKA

Perkuatan kelembagaan merupakan upaya sebuah organisasi untuk meningkatkan kapasitas baik institusi, sistem maupun individual dalam memperbaiki kinerja organisasi secara keseluruhan. Muyungi (2008) menyatakan bahwa *“capacity-building” is widely defined as the process of creating or enhancing capacities within an institution or a country to perform specific tasks on an on-going basis in order to attain a given developmental objective.*

Menurut Muyungi (2008) bahwa ada 3 aspek terkait perkuatan kelembagaan yaitu:

1. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
2. Penguatan Institusi melalui penyempurnaan prosedur dan metode dalam organisasi
3. Dan penumbuhan kapasitas system seperti penumbuhan system kesadaran, peraturan yang kondusif, dan pengelolaan system lingkungan Sehingga dengan demikian, manusia, system dan prosedur menjadi tumpuan perkuatan kelembagaan yang ada. Upaya pembangunan kapasitas institusi yang memiliki arah pengembangan untuk memperkuat kapasitas internal organisasi dalam menjalankan tupoksi mencapai visi misi dan merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dari kinerja pemerintahan.

Grindle (1997) menyatakan bahwa bahwa perkuatan kapasitas institusi seharusnya mengarah pada tiga hal berikut yaitu :

1. Pengembangan sumberdaya manusia
2. Penguatan organisasi
3. Reformasi kelembagaan

Upaya untuk melakukan perkuatan kelembagaan tidak dapat dilepaskan dari sebuah proses pembelajaran dalam organisasi untuk melakukan transformasi birokrasi. Sedang Bass dan Vaughn (dalam Szilagyi, Jr. Dan wallace ,Jr.: 1980), mendefinisikan learning sebagai: *"Learning is relatively permanent change in behavior which occurs as a result of experience"*. Dalam hal ini pembelajaran lebih ditekankan pada hasil yaitu perubahan permanen yang dihasilkan.

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), PEST (*Political, Economic, Social, Technological*), atau STEER (*Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory*) (Wikipedia 2014).

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi

dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner 2001).

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.

(<http://tesisdisertasi.blogspot.com>).

Peta jalan atau road map adalah sebuah arahan (*direction*) bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Esensi sebuah peta jalan adalah adanya jalur-jalur (*paths*) pengembangan yang bila diikuti akan membawa pelakunya mencapai tujuan pengembangan tersebut. Jalur-jalur ini disusun sedemikian rupa dengan memperhatikan berbagai faktor yang melekat pada konteks, situasi, dan lingkungan pengembangan, sehingga dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi yang tinggi. (<http://repo.unnes.ac.id>)

Menurut kamus ISO, pengertian sasaran mutu adalah

sesuatu yang diinginkan atau dituju, terkait mutu. Dengan kata lain sasaran mutu merupakan tujuan yang akan dicapai dalam melakukan proses pada suatu perusahaan / organisasi. Sasaran mutu secara umum didasarkan pada kebijakan mutu organisasi. Kebijakan Mutu yang telah ditentukan bisa sebagai pembuka jalan dalam pembuatan sasaran mutu, itu merupakan salah satu cara termudah, namun bisa juga menggunakan masukan dari tingkatan bawah (bottom-up) atau cara - cara lainnya. Semua cara - cara tersebut setidaknya harus sesuai dengan fokus kepada pelanggan dan dikomunikasikan ke semua tingkatan dalam perusahaan / organisasi. Sasaran mutu harus dibuat dalam bentuk target-target yang terukur sehingga pernyataan yang tertuang dalam kebijakan mutu mempunyai dampak yang nyata. Penetapan sasaran mutu dilakukan oleh Kepala Departemen atas persetujuan dari Top Manajemen berdasarkan Business Plan Perusahaan. Sasaran mutu yang telah ditetapkan harus disosialisasikan ke Internal Departemen masing-masing agar semua orang di dalam departemen tersebut mengerti kemana sasaran mereka dan bagaimana kontribusinya dalam mencapai sasaran tersebut. Metode pembuatan Sasaran Mutu dalam ISO 9001 harus mempunyai prinsip SMART yaitu harus *Specific* (Spesifik), *Measurable* (terukur), *Achievable* (dapat dicapai), *Relevant* (relevan), *Time-Bound* (Batas waktu) (Mahendra 2014).

SOP (*Standard Operating Procedures*) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP

dibuat dan di dokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang (Amsyah 2013).

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas manajemen dan pengelolaan PPKwusehingga diharapkan dapat menjadi pusat studi yang mandiri dalam mencapai pemenuhan target kerja dan anggaran. Melalui perbaikan tata kelola pusat studi diharapkan dapat meningkatkan dan menyinambungkan pelayanan pusat studi kepada mahasiswa dan masyarakat, meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian yang dilakukan serta meningkatkan jaringan kerjasama sehingga dapat mencapai misi UNS yaitu UNS menuju world class university. Secara khusus, tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Merevisi Renstra Pusat Pengembangan Kewirausahaan (PPKwu) LPPM UNS yang digunakan sebagai arah pengembangan kewirausahaan.
2. Merevisi Roadmap PPKwu yang merupakan rencana rinci tahapan sistematis dan

sistemis mengenai pelaksanaan kegiatan PPKwu.

3. Menyusun manual dan sasaran mutu pusat studi. Manual mutu akan menjadi rujukan prosedur mutu pusat studi sedangkan sasaran mutu akan menjadi target kerja bagi setiap unit yang berada di bawah PPKwu (Unit diklat dan pemagangan, unit riset dan pengembangan serta unit inkubator bisnis dan usaha produktif).
4. Merevisi dokumen SOP pelaksanaan kegiatan PPKwu. SOP yang dimaksud diantaranya SOP penerimaan staf dan peer group, SOP perencanaan kegiatan, penawaran kerjasama dan pengusulan proposal penelitian, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi (monev) kegiatan.

B. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Peningkatan Tata Kelola di Pusat Pengembangan Kewirausahaan Dalam Rangka Menjadi Pusat yang Mandiri ini adalah :

1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas manajemen Pusat Pengembangan Kewirausahaan.
2. Tersusunnya dokumen-dokumentata kelola organisasi PPKwu LPPM UNS sebagai panduan kegiatan kewirausahaan PPKwu
3. Tercapainya target kerja dan anggaran sehingga dapat menjadi pusat studi mandiri

METODE PENELITIAN

A. Metode Pelaksanaan Kegiatan

1. Waktu dan Lokasi Kegiatan

Kegiatan peningkatan tata kelola di PPKwu melalui workshop ini direncanakan dilakukan sebanyak 3 kali, masing-masing 2 hari dan bertempat di Gedung LPPM UNS Lantai II, Jl. Ir. Sutami No.36A Kertingan Surakarta 57126.

2. Peserta dan Narasumber Kegiatan

Peserta yang mengikuti kegiatan workshop peningkatan tata kelola di PPKwu adalah Peer Group PPKwu LPPM UNS dan staf administrasi serta narasumber workshop.

3. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup dari workshop peningkatan tata kelola di PPKwu LPPM UNS ini terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Tahap Persiapan

Kegiatan ini berupa :

- 1) Persiapan lokasi (tempat) pelaksanaan kegiatan
- 2) Identifikasi peserta (Peer Group PPKwu LPPM UNS, narasumber dan staf administrasi)
- 3) Pengiriman undangan kegiatan dilakukan melalui PPKwu LPPM dan instansi narasumber terkait.
- 4) Persiapan keperluan kegiatan (materi, peralatan dokumentasi, konsumsi, dan sebagainya)

b. Tahap implementasi

Pada tahap implementasi ini dilakukan :

- 1) Absensi peserta kegiatan
- 2) Pengelolaan pelaksanaan acara kegiatan
- 3) pendokumentasian pelaksanaan kegiatan kegiatan

c. Pelaporan

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan workshop peningkatan tata kelola di PPKwu. Kegiatan ini meliputi :

- 1) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan
- 2) Pengumpulan dokumen-dokumen pendukung kegiatan termasuk hasil kegiatan
- 3) Pengiriman laporan pelaksanaan kegiatan

4. Metode Kegiatan

Kegiatan peningkatan tata kelola di PPKwu dilakukan dengan penyelenggaraan workshop dimana setiap peserta berbagi informasi (*brain storming*) sehingga output yang dihasilkan adalah sumbang saran dari semua anggota Peer group PPKwu. Kegiatan peningkatan tata kelola di PPKwu dilaksanakan selama 2 hari.Masing-masing workshop mengangkat materi yang berbeda-beda sehingga pelaksanaan kegiatan workshop dapat lebih terfokus.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan peningkatan tata kelola di PPKwu ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu :

1. Workshop Revisi Renstra dan Road Map PPKwu

Workshop ini dilakukan untuk memperbaharui renstra dan roadmap PPKwu.Revisi renstra dan roadmap dilakukan guna menyesuaikan dengan kebutuhan pusat studi mengingat tuntutan terhadap pusat studi yang semakin tinggi. Rencana Strategis (Renstra) dibangun berdasarkan visi PPKwu yang merupakan kristalisasi cita-cita dan komitmen bersama tentang

kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan (perubahan lingkungan) yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan visi tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai tujuan dan sasaran yang akan dicapai lima tahun kedepan (2014-2019). Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, selanjutnya dirumuskan skenario untuk mencapainya.Skenario yang dimaksud meliputi strategi dan program pengembangan yang perlu ditempuh, beserta indikator-indikator keberhasilannya.Renstra PPKwu ini sejalan dengan Renstra UNS karena PPKwu LPPM merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UNS.

Roadmap PPKwu memuat rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan renstra. Selain itu, pada roadmap PPKwu perlu dijelaskan juga tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggungjawab dan dukungan yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pengukuran pencapaian kinerja serta monitoring dan evaluasi kegiatan di PPKwu.

2. Workshop Penyusunan Manual dan Sasaran Mutu PPKwu

PPKwu selama ini belum memiliki sasaran dan manual mutu.Dalam pelaksanaan organisasinya, PPKwu mengacu pada sasaran dan manual mutu LPPM UNS. Melalui workshop penyusunan sasaran mutu ini

diharapkan dapat ditetapkan tujuan yang akan dicapai oleh PPKwu. Sasaran mutu merupakan tujuan yang akan dicapai unit kerja yang dibuat dalam bentuk target-target yang terukur sehingga pernyataan yang tertuang dalam kebijakan mutu mempunyai dampak yang nyata. Sasaran mutu merupakan sasaran jangka pendek sehingga dapat dirubah dalam jangka waktu pendek untuk menyesuaikan dengan dinamika organisasi. Sasaran Mutu harus mempunyai prinsip SMART yaitu harus Specific (Spesifik), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Realistic (relevan), Time-Bound (Batas waktu).

Berbeda halnya dengan sasaran mutu, manual mutu akan memberikan gambaran tentang sistem manajemen mutu yang dilaksanakan di PPKwu. Secara isi Manual mutu adalah bukti dari komitmen top management bagaimana kebijakan organisasi untuk dapat memuaskan pelanggannya dalam hal ini masyarakat, mitra kerja dan instansi lain yang terkait dengan kegiatan di PPKwu. Manual mutu ini akan menjadi rujukan prosedur mutu atau dokumen yang setara dengan prosedur mutu.. Manual Mutu Akademik ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola pusat studi, Peer group, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan pengelolaan pusat studi yang lebih baik.

3. Workshop Revisi Standar Operational Procedure (SOP) PPKwu telah memiliki beberapa SOP pelaksanaan kegiatan seperti SOP penerimaan staf dan peer group, SOP perencanaan kegiatan,

penawaran kerjasama dan pengusulan proposal penelitian, pelaksanaan kegiatan dan monitoring evaluasi (monev) kegiatan. SOP yang ada diperbaharui, diperbaiki dan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan pusat studi saat ini. SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan, dan penggunaan fasilitas pemrosesan dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. SOP yang baik memiliki criteria diantaranya spesifik, lengkap, jelas dan mudah dipahami, layak terap (aplikatif), *Controllable*, layak audit dan layak ubah (*Changeable and flexible*).

HASIL YANG DICAPAI

Hasil kegiatan yang telah terlaksana adalah sebagai berikut :

Tahap Persiapan

Tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan adalah :1. Koordinasi pelaksanaan Kegiatan

Rapat koordinasi pelaksanaan workshop dilakukan pada hari Selasa, 19 Agustus 2014 di ruang PPKwu LPPM UNS. Rapat koordinasi dihadiri oleh tim peneliti dan staf administrasi PPKwu. Dari hasil rapat koordinasi diperoleh hasil sbb :

- a. Workshop Revisi Renstra dan Roadmap akan dilaksanakan pada P2 September 2014
- b. Workshop Penyusunan Manual Mutu dan Sasaran Mutu PPKwu akan dilaksanakan pada P4 September 2014

- c. Workshop Revisi SOP PPKwu akan dilaksanakan pada P2 Oktober 2014.
 - d. Kegiatan Workshop akan dilaksanakan di LPPM UNS
2. Persiapan Dokumen yang akan di Evaluasi

Dokumen PPKwu yang akan dievaluasi adalah sbb :

- a. Roadmap PPKwu
Saat ini, PPKwu menggunakan roadmap yang disusun tahun 2007 dan akan berakhir tahun 2016. Roadmap ini perlu dilakukan revisi dengan menyesuaikan tuntutan kebutuhan kemajuan pusat studi.
- b. Renstra PPKwu
Rencana Strategis PPKwu telah disusun tahun 2011 dan dapat digunakan sampai tahun 2016. Rencana ini perlu direvisi untuk menjadikan PPKwu sebagai pusat Riset dan Layanan Bidang Kewirausahaan yang Profesional.
- c. SOP PPKwu
SOP yang dimiliki oleh PPKwu saat ini meliputi :
 1. Monitoring kegiatan kerjasama
 2. Pelaksanaan penelitian
 3. Pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif melalui LPPM UNS
 4. Pengajuan kerjasama dengan Kompetisi melalui LPPM UNS
 5. Perencanaan Pelaksana Kegiatan PPKwu
 6. Penerimaan Peer Group PPKwu
 7. Penerimaan Staf administrasi PPKwu

Beberapa SOP yang dimiliki PPKwu ini perlu dilakukan revisi dengan menyesuaikan kebijakan dari UNS. Hal ini terkait dengan perubahan-perubahan dan kemajuan system informasi P2M.

3. Persiapan teknis pelaksanaan workshop

Persiapan teknis pelaksanaan workshop antara lain:

- a. Persiapan dokumen-dokumen yang dijadikan bahan workshop, seperti : renstra, roadmap, dan SOP. Untuk manual mutu dan sasaran mutu, dokumen yang digunakan adalah manual mutu dan sasaran mutu LPPM UNS.
- b. Pembuatan undangan dan pengiriman undangan kepada Peer Group PPKwu LPPM UNS, staff administrasi PPKwu LPPM UNS dan narasumber.
- c. Persiapan keperluan kegiatan seperti persiapan ruangan, materi, peralatan dokumentasi dan konsumsi.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap implementasi kegiatan yang telah dilakukan adalah :

1. Workshop Revisi Renstra dan Roadmap PPKwu
Workshop revisi renstra PPKwu ini dilaksanakan pada tanggal 3-4 Oktober 2014 bertempat di PPKwu LPPM UNS. Workshop ini dihadiri oleh anggota Peer Group PPKwu dan staff administrasi PPKwu. Dari hasil workshop, revisi renstra dan roadmap PPKwu perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan kemajuan

pusat studi serta menjadikan PPKwu sebagai pusat studi yang profesional. Adapun hasil revisi adalah sebagai berikut :

A. Renstra PPKwu

Renstra PPKwu tidak banyak mengalami revisi karena Renstra PPKwu baru dibuat pada tahun 2011 dan masih sesuai dengan kondisi lembaga saat ini. Revisi Renstra dilakukan terhadap redaksional Renstra agar lebih mudah dipahami oleh semua personil PPKwu. Selain itu, perubahan dilakukan dengan menyesuaikan tahun perubahan renstra.

B. Roadmap PPKwu

Perubahan roadmap PPKwu lebih banyak dibandingkan Renstra. Pada roadmap PPKwu di bidang penelitian dan pengembangan disusun Roadmap yang sesuai dengan Riset Group (RG) Kewirausahaan yang memayungi penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh PPKwu untuk 10 tahun ke depan di bidang kewirausahaan. Selain itu, dilakukan revisi pada target organisasi dan produk-produk yang dikembangkan PPKwu. Roadmap PPKwu sebelumnya akan berakhir pada 2016 dan setelah dilakukan revisi dan *update*, Roadmap PPKwu dapat digunakan sampai tahun 2026.



Gambar 1. Kepala PPKwu sedang memberi penjelasan mengenai roadmap dan renstra PPKwu yang akan direvisi



Gambar 2. Workshop revisi renstra dan roadmap PPKwu di ruang PPKwu LPPM UNS

2. Workshop Penyusunan Manual dan Sasaran Mutu PPKwu serta Revisi SOP PPKwu

Workshop ini dilaksanakan di Ruang Sidang 3, Lantai II LPPM UNS pada tanggal 24-25 Oktober 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 orang peergroup dan 6 orang narasumber.

Saat ini, PPKwu belum memiliki Sasaran dan Manual Mutu. Pada workshop hari pertama, dilakukan penyusunan sasaran dan manual mutu pusat studi. Sasaran mutu PPKwu dibuat dalam bentuk target-target yang terukur sehingga manual mutu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Manual mutu PPKwu yang disusun berisi :

- a. Visi dan Misi PPKwu
- b. Tujuan PPKwu
- c. Budaya Kerja PPKwu
- d. Pernyataan mutu
- e. Profil PPKwu
- f. Struktur Organisasi PPKwu
- g. Kebijakan mutu
- h. Sasaran Mutu PPKwu
- i. Strategi Pencapaian

Hari kedua, kegiatan workshop dilakukan untuk meninjau SOP yang ada dan melakukan revisi pada beberapa SOP PPKwu. Revisi ini dilakukan agar SOP PPKwu lebih sistematis. Beberapa SOP yang masih dapat digunakan dan tidak perlu dilakukan revisi adalah :

1. Monitoring kegiatan kerjasama
2. Pelaksanaan penelitian
3. Perencanaan Pelaksana Kegiatan PPKwu
4. Penerimaan Peer Group PPKwu
5. Penerimaan Staf administrasi PPKwu

Revisi SOP dilakukan untuk 2 jenis SOP yaitu :

1. Pengajuan Proposal Penelitian Kompetitif melalui LPPM UNS
2. Pengajuan kerjasama dengan Kompetisi melalui LPPM UNS

Hal ini terkait dengan system pendaftaran kegiatan penelitian dan pengabdian kompetitif yang terkomputerisasi (IRIS 1103 dan SIMLITABMAS). Selain dilakukan revisi pada SOP pengajuan proposal penelitian, juga dilakukan pembuatan Instruksi Kerja (IK) untuk Pengajuan Usulan Penelitian Melalui Simlitabmas Dikti Dan Pengajuan Usulan Penelitian Melalui Sistem

Manajemen Informasi Iris1103 (Intelligent Research And Innovation Service 1103) Universitas Sebelas Maret.



Gambar 3. Penyampaian materi oleh Tutik Susilowati, S.Sos., M.Si., mengenai Manual dan Sasaran Mutu serta SOP PPKwu



Gambar 4. Workshop Penyusunan Manual dan Sasaran Mutu PPKwu serta Revisi SOP PPKwu di Ruang Sidang 3, Lantai II LPPM UNS

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kegiatan koordinasi awal pelaksanaan penelitian telah dilaksanakan pada hari Selasa, 19 Agustus 2014.
2. Workshop revisi Renstra dan Roadmap PPKwu telah dilaksanakan pada tanggal 3-4 Oktober 2014 di PPKwu LPPM UNS yang dihadiri oleh 20 orang peserta dan 3 narasumber.

3. Workshop penyusunan manual dan sasaran mutu PPKwu serta revisi SOP PPKwu telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2014 di Ruang Sidang 3, lantai II LPPM UNS yang dihadiri oleh 20 orang peserta dan 6 orang narasumber.
- B. SARAN**
- Perlu meningkatkan koordinasi untuk pelaksanaan-pelaksanaan workshop yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah. 2014. <http://taufikamsyah.wordpress.com/2013/02/18/pengertian-sop>.
- Grindle M S. 1997. Editor and Contributor, *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries* (Cambridge, MA: Harvard University Press for Harvard Institute for International Development, 1997); Chapter 1, "*The Good Government Imperative: Human Resources, Organizations, and Institutions*;" Chapter 2, with Mary Hilderbrand, "*Building Sustainable Capacity in the Public Sector: What Can Be Done?*"
- <http://repo.unnes.ac.id/dokumen/roadmap-tik-unnes.pdf>
- <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengertian-perencanaan-strategis.html>.
- Mahendra. 2014. <http://mahendrawhephe.blogspot.com/2012/11/sasaran-mutu.html>.
- Richard Muyungi. 2008. *Capacity Building Needs And Opportunities From The Perspective Of Environmental Management Agencies In The Context Of Climate Change*.